



# Pengaruh Tenaga Kerja, IPM, dan IPTIK Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Ratih Mayasari\*, Nurlaili, Zulaikah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung  
Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>mayasariratih46@gmail.com, <sup>2</sup>nurlaili@radenintan.ac.id, <sup>3</sup>zulaikah@radenintan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: mayasariratih46@gmail.com

Submitted: 07/04/2026; Accepted: 04/05/2026; Published: 07/05/2026

**Abstrak**—Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia meskipun pembangunan terus mengalami kemajuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2018–2023 dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan merupakan data panel dari 34 provinsi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel melalui perangkat lunak EVIEWS. Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0140 (< 0,05). Sementara itu, variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai probabilitas sebesar 0,7060 (> 0,05). Adapun variabel IP-TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai koefisien sebesar -0,008657 dan probabilitas 0,0019 (< 0,05). Secara simultan, tenaga kerja, IPM, dan IP-TIK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai F-statistic sebesar 97,78723 dan probabilitas 0,000000 (< 0,05). Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan pemerataan distribusi kekayaan sebagaimana tercermin dalam maqāsid al-syarī'ah, sehingga kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerataan pendidikan, serta pengembangan teknologi yang inklusif guna mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja; Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Ketimpangan Pendapatan; Ekonomi Islam

**Abstract**—Income inequality is still an important problem in Indonesia's economic development even though development continues to progress. This study aims to analyze the influence of labor, the Human Development Index (HDI), and the Information and Communication Technology Development Index (IP-ICT) on income inequality in Indonesia for the period 2018–2023 from an Islamic economic perspective. The data used is panel data from 34 provinces sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and analyzed using a quantitative approach with the panel data regression method through EVIEWS software. Based on the results of the t-test in this study, it is shown that partially labor has a positive and significant effect on income inequality with a probability value of 0.0140 (< 0.05). Meanwhile, the HDI variable had no significant effect on income inequality with a probability value of 0.7060 (> 0.05). The IP-ICT variable has a negative and significant effect on income inequality with a coefficient value of -0.008716 and a probability of 0.0019 (< 0.05). Simultaneously, labor, HDI, and IP-ICT have a significant effect on income inequality with an F-statistic value of 97.78723 and a probability of 0.000000 (< 0.05). From an Islamic economic perspective, income inequality is contrary to the principles of justice ('adl) and the equitable distribution of wealth as reflected in maqāsid al-syarī'ah, so development policies need to be directed at improving the quality of labor, equitable distribution of education, and inclusive technology development to realize a fair and sustainable distribution of income.

**Keywords:** Labor Force, Human Development Index (HDI), ICT Development Index (IDI), Income Inequality, Islamic Economics

## 1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan konsep yang menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran, standar hidup, dan pendapatan yang diperoleh oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata antar wilayah, yang disebabkan oleh variasi faktor produksi dan sumber daya yang tersedia di tiap daerah. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar terjadi di negara-negara yang masih berada pada tahap awal pembangunan, sementara di negara maju dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan biasanya lebih merata dan tingkat ketimpangannya lebih rendah (Sabillah & Sabillah, 2023).

Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan pendapatan terjadi ketika terdapat perbedaan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga distribusi pendapatan nasional menjadi tidak merata. Ketimpangan ini dapat muncul di suatu wilayah sebagai akibat dari perbedaan sumber daya alam serta kondisi geografis antar daerah. Selain itu, Simon Kuznets melalui hipotesis "U-terbalik" menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Namun, seiring dengan berjalannya proses pembangunan dan tercapainya tahap tertentu, ketimpangan tersebut akan menurun seiring dengan semakin meratanya distribusi pendapatan. Pada fase awal pembangunan di negara berkembang, wilayah yang lebih maju umumnya memiliki kemampuan lebih besar dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Sebaliknya, daerah yang tertinggal menghadapi kendala dalam memanfaatkan peluang tersebut akibat keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia (Riani & Suseno, 2025).

Ketimpangan pendapatan (income inequality) menjadi permasalahan krusial untuk kemajuan setiap bangsa. Secara teori dan didukung oleh sejumlah penelitian. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat



berpengaruh pada ketidakmerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berhubungan dengan penyebaran pendapatan yang diterima oleh komunitas dalam sebuah negara. Semakin besar ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak seimbang. Keadaan ini pada akhirnya akan memperlebar jurang kesenjangan (gap) antara masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif baik dengan mereka yang kelompok dengan pendapatan rendah (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Ketimpangan pada dasarnya merupakan fenomena yang sulit dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Keberadaan ketimpangan justru dapat menjadi pendorong bagi wilayah yang tertinggal untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Selain itu, kondisi ini juga memicu persaingan antarwilayah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam batas tertentu ketimpangan dapat memberikan dampak positif. Namun demikian, ketimpangan yang semakin tinggi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas masyarakat, serta kondisi ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian pihak (Oktarina & Yuliana, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang, mutu Sumber Daya Manusia yang belum seimbang, dan ketidakmerataan sumber energi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju meskipun juga mengalami masalah ketidakmerataan pendapatan. Perbedaannya terdapat pada sejauh mana ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara itu, serta luas area dan jumlah penduduk yang menjadi tingkat tantangan dalam mengatasi isu ketidakmerataan pendapatan (Oksamulya & Anis, 2020). Level Ketimpangan dapat diukur menggunakan indeks gini. Berikut data Gini rasio tahun 2018-2023 Pada 34 Provinsi di Indonesia menurut BPS :

**Tabel 1.** Ketimpangan menggunakan rasio gini di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023

No	Provinsi	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	0,318	0,321	0,319	0,323	0,291	0,296
2	Sumatera Utara	0,311	0,315	0,314	0,313	0,326	0,309
3	Sumatera Barat	0,305	0,307	0,301	0,300	0,292	0,280
4	Riau	0,347	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324
5	Jambi	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335	0,343
6	Sumatera Selatan	0,341	0,339	0,338	0,340	0,330	0,338
7	Bengkulu	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315	0,333
8	Lampung	0,326	0,331	0,320	0,314	0,313	0,324
9	Bangka Belitung	0,272	0,262	0,257	0,247	0,255	0,245
10	Kepulauan Riau	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,340
11	Dki Jakarta	0,390	0,391	0,400	0,411	0,412	0,431
12	Jawa Barat	0,405	0,398	0,398	0,406	0,412	0,425
13	Jawa Tengah	0,357	0,358	0,359	0,368	0,366	0,369
14	Di Yogyakarta	0,422	0,428	0,437	0,436	0,459	0,449
15	Jawabtimur	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387
16	Banten	0,367	0,361	0,365	0,363	0,377	0,368
17	Bali	0,364	0,370	0,369	0,375	0,362	0,362
18	Nusa Tenggara Barat	0,391	0,374	0,386	0,384	0,374	0,375
19	Nusa Tenggara Timur	0,359	0,355	0,356	0,339	0,340	0,325
20	Kalimantan Barat	0,325	0,318	0,325	0,315	0,311	0,321
21	Kalimantan Tengah	0,344	0,335	0,320	0,320	0,309	0,317
22	Kalimantan Selatan	0,340	0,334	0,351	0,325	0,309	0,313
23	Kalimantan Timur	0,342	0,335	0,335	0,331	0,317	0,322
24	Kalimantan Utara	0,304	0,292	0,300	0,285	0,270	0,277
25	Sulawesi Utara	0,372	0,376	0,368	0,359	0,359	0,370
26	Sulawesi Tengah	0,317	0,330	0,321	0,326	0,305	0,304
27	Sulawesi Selatan	0,388	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377
28	Sulawesi Tenggara	0,392	0,393	0,388	0,394	0,366	0,371
29	Gorontalo	0,417	0,410	0,406	0,409	0,423	0,417
30	Sulawesi Barat	0,366	0,365	0,356	0,366	0,371	0,351
31	Maluku	0,326	0,320	0,326	0,316	0,306	0,288
32	Maluku Utara	0,336	0,310	0,290	0,278	0,309	0,300
33	Papua Barat	0,391	0,381	0,376	0,374	0,384	0,370
34	Papua	0,398	0,391	0,395	0,396	0,393	0,388
35	<b>Indonesia</b>	<b>0,384</b>	<b>0,380</b>	<b>0,385</b>	<b>0,381</b>	<b>0,381</b>	<b>0,388</b>

Berdasarkan Tabel 1 data gini rasio dari 34 provinsi di Indonesia terlihat dari tabel di atas kalkulasi gini rasio tertinggi pada tahun 2018-2023 yaitu pada provinsi DI Yogyakarta yaitu memiliki angka gini rasio pada tahun 2021



sebesar 0,436 dan naik signifikan pada tahun berikutnya yaitu pada angka 0,459, sedangkan provinsi dengan rasio gini terendah yaitu pada provinsi Kalimantan Utara yaitu memiliki angka rasio gini pada tahun 2021 pada angka 0,285 dan pada tahun 2022 turun pada angka 0,270.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthpi Azhar and M. Rusmin Nuryadin (Azhar & Nuryadin, 2025) tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Artinya setiap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Meningkatnya ketimpangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan ketersediaan pekerjaan, hal ini dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, yang selanjutnya berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Saat jumlah tenaga kerja melebihi permintaan pasar, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbatas akan semakin sengit. Sebagai hasilnya, gaji cenderung rendah dan penghasilan yang diterima oleh mayoritas pekerja menjadi terbatas Perbedaan penghasilan antara pekerja yang lebih terampil dan mereka yang kurang terampil semakin memperlebar kesenjangan sosial serta ketidaksetaraan pendapatan. Oleh sebab itu, untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang cukup.

Kesenjangan pendapatan dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja. Dengan asumsi adanya korelasi antara jumlah tenaga kerja dan produktivitasnya, maka diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Jika produktivitas tumbuh seiring dengan produksi yang lebih tinggi, hal itu berpotensi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan pendapatan (Devi Astuti & Alexandra Hukum, 2023)

Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang berperan serta secara aktif dalam pasar tenaga kerja semakin meningkat. Keterlibatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, yang berkontribusi pada pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi konsentrasi ekonomi yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat atas.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Berliana Ivanovi Sulistyaningrum et al. (S. Berliana & Dwi, 2022) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 memiliki hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh negatif dan signifikan.

Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Gary Becker dan Theodore Schultz menyatakan bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bentuk modal yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, manusia memiliki potensi untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari naiknya produktivitas tenaga kerja. Dengan kualitas masyarakat yang semakin baik, produktivitas, kreativitas, dan kemampuan berinovasi juga akan meningkat, sehingga mampu menciptakan daya saing di dunia kerja dan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan (Ardiani & Prabowo, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Nur Arif Wijayanti et al. (Wijayanti et al., 2023) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021, memiliki hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa variabel teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode 2018-2021.

Saat ini, dunia telah memasuki era digital. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi faktor penting kemajuan suatu wilayah. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah membuktikan, dengan memanfaatkan teknologi suatu negara dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan negara. TIK telah menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari meluasnya penggunaan aplikasi yang berdampak pada proses yang lebih efisien dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang (Al-Mursyid, 2020).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga bisa menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Fenomena TIK cenderung semakin memperbesar kesenjangan ini, karena keuntungan lebih banyak dirasakan oleh individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar, sementara kelompok berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses atau memanfaatkan teknologi tersebut. Ketidakmerataan yang sangat tinggi dapat memicu berbagai permasalahan sosial lainnya (Prayoga et al., 2024)

Masalah yang dihadapi pada penelitian ini yaitu dapat dilihat adanya kesenjangan (gap) antara penelitian yang dilakukan oleh Aprillia Nilasari (Nilasari & Amelia, 2022), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Yang apabila suatu daerah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthpi Azhar tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Artinya setiap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan.



Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Axel J.Lala (Lala et al., 2023), Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, Suatu keadaan yang apabila suatu daerah Indeks Pembangunan Manusiannya meningkat maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Berliana Ivanovi Sulistyaningrum (S. Berliana & Dwi, 2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diyakini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap peluang kerja maupun peningkatan pendapatan. Namun demikian, kajian mengenai sejauh mana pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masih relatif terbatas, terutama di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti faktor-faktor konvensional seperti tenaga kerja, investasi, atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara variabel IP-TIK masih jarang disentuh. Kondisi ini menimbulkan research gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut, mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak ganda: di satu sisi mampu memperkecil ketimpangan melalui perluasan akses, namun di sisi lain berpotensi memperbesar kesenjangan jika hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Ketimpangan ekonomi dalam pandangan islam dipahami sebagai situasi yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penguasaan sumber daya ekonomi antara orang atau kelompok masyarakat. Dalam prinsip ajaran Islam, ketidaksetaraan seperti ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan ('adl) yang menjadi dasar bagi tatanan sosial ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis dengan jelas menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan yang parah sementara yang lainnya menikmati kekayaan yang berlebihan (Karimullah, 2025).

Allah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di bumi dan Allah yang menentukan derajat manusia bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin agar hal itu menjadi ujian, lalu Allah memberikan ganjaran atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa menilai dirinya berada di tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena yang menentukan hanyalah Allah. Kepemilikan aset oleh segelintir individu dalam suatu komunitas akan menyebabkan ketidakseimbangan hidup dan akibat buruk bagi kehidupan (Qadir, 2021) Pembahasan ini diantaranya dari firman Allah Swt. Surat Al-Hasyr 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menegaskan prinsip pemerataan harta. Harta atau kekayaan yang ada di masyarakat tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak ketimpangan ekonomi yang tinggi dan mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan menjadi penting sebagai upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari data yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka (Syahrizal & Jailani, 2023).

### 2.2 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data penelitian meliputi tenaga kerja (Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018-2023. Instrumen penelitian berupa dokumen statistik dan publikasi resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan memanfaatkan laporan pemerintah dan literatur ilmiah yang relevan.

### 2.3 Populasi

Populasi ialah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki ciri yang sama atau paling sedikit mempunyai ciri khusus yang menjadi target penelitian tersebut (Dewi et al., 2023). Adapun populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah Seluruh data 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.



**2.4 Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode seleksi tertentu agar diperoleh sejumlah individu yang representatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi populasi secara umum dan sesuai dengan tujuan penelitian (Syahroni, 2022). Dalam penelitian ini Sampel penelitian yaitu 34 provinsi yang memiliki data lengkap untuk variabel Ketimpangan pendapatan, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia dimana data tersebut dimulai tahun 2018-2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah 204 data (34 Provinsi x 6 tahun).

**2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dimana merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data diperoleh secara sekunder mengenai data Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi 34 provinsi di Indonesia, dimana data tersebut dimulai dari tahun 2018-2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik yang kemudian akan diolah menggunakan alat bantu E-views 12 dengan menggunakan uji Regresi data panel, estimasi data panel, uji Asumsi Klasik dan Uji hipotesis.

**2.6 Devinisi variabel Penelitian**

Definisi operasional variabel merupakan uraian yang bertujuan untuk membatasi sekaligus memperjelas arti dari setiap variabel dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen (Y), variabel independen (X), dan variabel kontrol. Variabel dependen merupakan variabel terikat yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Sementara itu, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang berperan sebagai faktor penyebab munculnya perubahan pada variabel dependen. Disebut sebagai variabel bebas karena memiliki kemampuan untuk memengaruhi variabel lainnya (Yusril, 2024). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Ketimpangan Pendapatan sedangkan variabel independen adalah Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi. Berikut ini menyajikan indikator pengukuran dari variabel penelitian:

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tenaga Kerja (X1)	Tenaga Kerja adalah Setiap orang laki-laki atau perempuan melakukan pekerjaan, baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Rasio
Indeks Pembangunan Manusia X2)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang	Rata-rata Lama Sekolah	Rasio
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (X3)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah.	Nilai IPTIK (Indeks)	Rasio
Ketimpangan Pendapatan (Y)	Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah istilah yang menggambarkan variasi dalam kekayaan, standar hidup, serta penghasilan per individu atau keluarga didalam masyarakat.	Nilai Gini Ratio	Rasio

**2.7 Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui metode regresi data panel untuk menguji pengaruh tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi terhadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Pemilihan model panel terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini Jadi tidak perlu untuk melakukan uji selanjutnya yaitu uji LM. Berdasarkan model terpilih, persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$KPit = \alpha + \beta 1TKit + \beta 2 IPMit + \beta 3IPTIKit + \epsilon it \tag{1}$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel yang digunakan, model ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja ( $TKit$ ), Indeks Pemabngunan Manusia ( $IPMit$ ), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( $IPTIKit$ ) terhadap Ketimpangan Pendapatan ( $KPit$ ). Dalam model tersebut,  $\alpha$  merupakan konstanta, sedangkan  $\beta$  menunjukkan koefisien regresi masing-masing variabel independen. Simbol  $\epsilon it$  merepresentasikan error

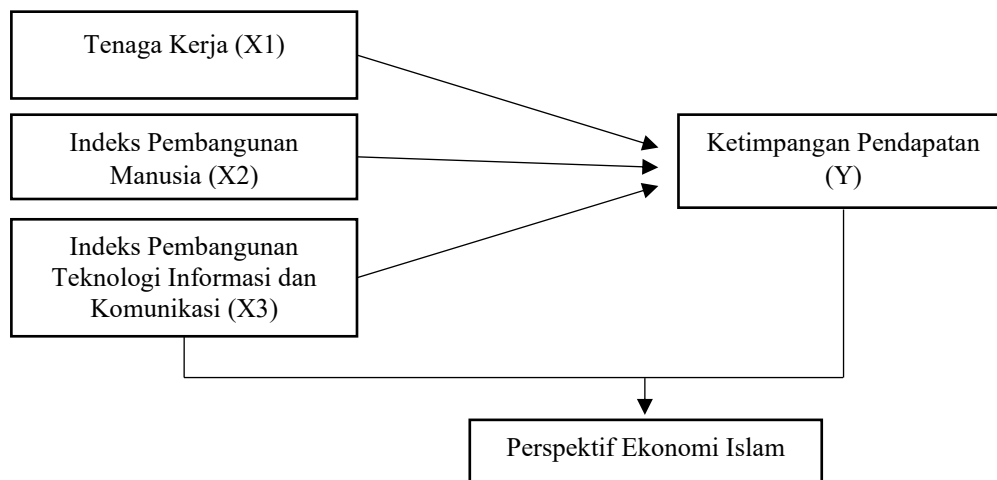


term yang mencerminkan pengaruh variabel lain di luar model. Selanjutnya, *i* menyatakan unit cross section (34 provinsi di Indonesia), sedangkan *t* menunjukkan periode waktu penelitian, yaitu tahun 2018-2023.

## 2.8 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Kerangka teori penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi Tenaga Kerja, Indeks Pemabngunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sedangkan variabel dependen adalah Ketimpangan Pendapatan. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa perspektif ekonomi Islam untuk memperjelas hubungan antarvariabel.

Berdasarkan pada Gambar 1, kerangka teori dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ketimpangan Pendapatan (*Y*) dipengaruhi oleh Tenaga Kerja, Indeks Pemabngunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan perspektif ekonomi Islam sebagai variabel kontrol. Tenaga kerja (*X1*) mencerminkan jumlah dan peran sumber daya manusia dalam kegiatan produksi, di mana peningkatan tenaga kerja yang terserap secara produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (*X2*) merepresentasikan tingkat pendidikan masyarakat, di mana semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik, sehingga berpotensi menekan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*X3*) menggambarkan tingkat perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam masyarakat, di mana kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akses ekonomi, namun juga berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses. Perspektif ekonomi Islam digunakan untuk memperkuat analisis hubungan antarvariabel dengan menekankan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.



**Gambar 1.** Kerangka Berfikir

Adapun hipotesis yang dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan  
Dalam teori Lewis, dia berpendapat bahwa ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sektor, yaitu ekonomi tradisional di pedesaan dan ekonomi industri di perkotaan. Di pedesaan, di mana sektor pertanian mendominasi, ada surplus tenaga kerja karena tingkat hidup masyarakatnya subsisten, sehingga nilai tambahan yang diberikan oleh tenaga kerja menjadi rendah (Ali, 2023). Pada penelitian (Novia & Prihadi, 2022) menunjukkan bahwa Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  
H1: tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan  
Menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan. Ia mengatakan bahwa pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Farhan & Sugianto, 2022). Pada penelitian (Agam Firdaus, 2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Maka dapat di simpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:  
H2: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Ketimpangan Pendapatan  
Teori yang dikembangkan oleh Robert M. Solow yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai faktor utama yang mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi (Tri Nugraha et al., 2023). Pada penelitian



(Wijayanti et al., 2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Maka dapat di simpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H3: Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

4. Pengaruh Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Simultan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

H4 : Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi diduga berpengaruh bersama sama secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1.1. Common Effect Model (CEM)

**Tabel 3.** Hasil Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.256153	0.076904	3.330804	0.0010
TK	0.001286	0.000857	1.500402	0.1351
IPM	-0.012919	0.004302	3.003242	0.0030
IPTIK	0.020304	0.004956	4.096745	0.0001

Persamaan regresi data panel dengan random effect model :

$$C = 0.256153 + 0.001286 TK - 0.012919 IPM + 0.020304 IPTIK$$

Berdasarkan Tabel 3 hasil regresi data panel Common Effect Model (CEM) diperoleh bahwa variabel Tenaga Kerja (TK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan selama periode penelitian. Koefisien konstanta (C) sebesar 0.001286 signifikan secara statistik (p-value = 0,1351). Dan Variabel IPM memiliki koefisien - 0.012919 dengan (p-value = 0,0030) berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Sementara IPTIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Koefisien konstanta (C) sebesar 0.020304 dengan (p value = 0,0001).

#### 3.1.2 Fixed Effect Model (FEM)

**Tabel 4.** Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.300572	0.050284	5.977428	0.0000
TK	0.001150	0.000463	2.484132	0.0140
IPM	0.001774	0.004696	0.377840	0.7060
IPTIK	-0.008657	0.002748	5.977428	0.0019

Persamaan regresi data panel dengan fixed effect model :

$$C = 0.300572 + 0.001150 TK + 0.001774 IPM - 0.008657 IPTIK$$

Berdasarkan Tabel 4 hasil regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) diperoleh bahwa variabel Tenaga Kerja (TK) berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan selama periode penelitian dengan Koefisien konstanta (C) sebesar 0.001150 signifikan secara statistik (p-value = 0,0140). Dan Variabel IPM memiliki koefisien 0.001774 dengan (p-value = 0,7060) tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Sementara itu IPTIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Koefisien konstanta (C) sebesar -0.008657 dengan (p value = 0,0019).

#### 3.1.3 Random Effect Model (REM)

**Tabel 5.** Hasil Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.297839	0.048066	6.196431	0.0000
TK	0.001221	0.000453	2.694817	0.0076
IPM	0.000694	0.004168	0.166548	0.8679
IPTIK	-0.007381	0.002612	-2.826055	0.0052

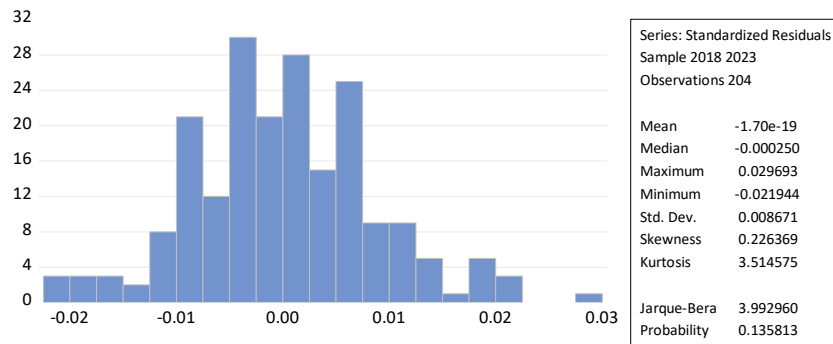
Persamaan regresi data panel dengan random effect model :

$$C = + 0.001150 TK + 0.001774 IPM - 0.008657 IPTIK$$



Berdasarkan Tabel 5 hasil regresi data panel Random Effect Model (REM) diperoleh bahwa variabel Tenaga Kerja (TK) berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan selama periode penelitian dengan Koefisien konstanta (C) sebesar 0.001221 signifikan secara statistik ( $p\text{-value} = 0,0076$ ). Dan Variabel IPM memiliki koefisien 0.000694 dengan ( $p\text{-value} = 0,8679$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Sementara itu IPTIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Koefisien konstanta (C) sebesar -0.007381 dengan ( $p\text{ value} = 0,0052$ ).

**3.1.4 Uji Normalitas**



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2 diperoleh hasil bahwa nilai JB (Jaque Bera) sebesar 3.992960 dan ( $p\text{-value} = 0.135813$ ) lebih besar dari signifikansi 0,05 (5%), sehingga  $H_0$  diterima, yang berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal. Artinya, penyebaran error atau residual model regresi tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal.

**3.1.5 Uji Chow**

**Tabel 6.** Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	96.275706	(33,167)	0.0000
Cross-section Chi-square	611.379546	33	0.0000

Berdasarkan Tabel 6 hasil Uji Chow, menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dan probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000. Kedua nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari nilai signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka dapat diinterpretasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Penolakan  $H_0$  pada uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan CEM.

**3.1.6 Uji Hausman**

**Tabel 7.** Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	8.327137	3	0.0397

Berdasarkan Tabel 7 hasil Uji Hausman, nilai Chi-Square Statistic sebesar 8.327137 dengan D.F sebesar 3 dan ( $p\text{-value} = 0,0397$ ). nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_1$  diterima yang artinya Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect Model (REM). Dengan demikian, REM dinilai lebih efisien dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, karena variasi yang terjadi antar unit Cross-Section. Setelah melakukan pengujian data panel statis dan pemilihan model terbaik melalui uji Chow dan uji Hausman. Di dapatkan bahwa **Fixed Effect Model (FEM)** sebagai model terbaik yang dapat digunakan. Jadi tidak perlu untuk melakukan uji selanjutnya yaitu uji LM.

**3.1.7 Uji T (Parsial)**

**Tabel 8.** Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.300572	0.050284	5.977428	0.0000
TK	0.001150	0.000463	2.484132	0.0140
IPM	0.001774	0.004696	0.377840	0.7060
IPTIK	-0.008657	0.002748	5.977428	0.0019

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji-t (parsial) pada Tabel 10 dengan pendekatan FEM diperoleh maka hasil uji t (parsial) Nilai coefficient variabel Tenaga Kerja sebesar 0.001150, dengan t-statistic sebesar 2.484132 dan ( $p\text{-value} =$



0.0140). Oleh karena nilai  $p$  lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H1 diterima. Artinya, secara parsial, Tenaga Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Nilai coefficient variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.001774 dan nilai  $t$  statistik sebesar 0.377840, dengan ( $p$ -value = 0.7060). Oleh karena nilai  $p$  lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05), maka hipotesis H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia selama periode pengamatan. Nilai Coefficient variabel Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) sebesar -0.008657 dengan ( $p$ -value = 0.0019). Oleh karena nilai  $p$  lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis H3 diterima. Artinya, secara parsial Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

### 3.1.8 Uji F (Simultan)

**Tabel 9.** Hasil Uji f

F-statistic	97.78723
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji F (simultan) dengan pendekatan Fixed Effect Model, diperoleh nilai F-Statistic sebesar 97.78723 dengan Probabilitas (F-Statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi umum ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas dalam model, Yaitu Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Artinya hasil estimasi bersama-sama atau simultan variabel independen yang terdapat pada model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.1.9 Multikolinearitas

**Tabel 10.** Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.454224	-0.319570
X2	-0.454224	1.000000	0.692456
X3	-0.319570	0.692456	1.000000

Berdasarkan tabel 10 hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan melalui matriks korelasi antar variabel independen, diketahui bahwa korelasi antara variabel X1 dan X2 sebesar -0,454224 serta antara X1 dan X3 sebesar -0,319570 serta X2 dan X3 sebesar 0.692456. Nilai korelasi tersebut masih berada di bawah  $<0,85$ , sehingga tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas yang serius.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), dapat disimpulkan bahwa variabel Tenaga Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2018–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0.001150 dengan probabilitas 0.0140 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, setiap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kesempatan dan kualitas pekerjaan, sehingga kontribusinya terhadap distribusi pendapatan masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor tradisional di pedesaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan sektor modern di perkotaan yang berfokus pada kegiatan industri. Pada sektor pedesaan, tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja, sehingga sebagian besar masyarakat hidup pada tingkat subsisten (Lestari et al., 2021). Kondisi tersebut terjadi karena struktur perekonomian yang masih bersifat tradisional dan produktivitas yang relatif rendah, sehingga tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian tidak sepenuhnya terserap secara produktif. Akibatnya, pembangunan ekonomi kemudian ditandai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional di pedesaan menuju sektor modern di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas dan upah yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pamiati & Woyanti, 2021) dengan judul Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tpk Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. Memiliki hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa TPAK Tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2019. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja belum tentu secara langsung mampu menurunkan tingkat ketimpangan, karena bertambahnya jumlah tenaga kerja tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas, maupun pemerataan pendapatan. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila penyerapan tenaga



kerja masih terkonsentrasi pada sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah, sehingga dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan belum terlihat secara signifikan.

### **3.2.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam penelitian ini diproksikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2018–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0.001774 dengan probabilitas 0.7060 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, secara statistik peningkatan rata-rata lama sekolah belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan tingkat ketimpangan pendapatan antarprovinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aspek pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah belum secara langsung diikuti oleh pemerataan pendapatan, kemungkinan karena perbedaan kualitas pendidikan, kesempatan kerja, serta struktur ekonomi antarwilayah.

Menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan. Ia mengatakan bahwa pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut (Farhan & Sugianto, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prasetya et al., 2022) dengan judul Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia memiliki hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM yang mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup belum tentu secara langsung mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang merata antarwilayah, sehingga dampaknya terhadap ketimpangan masih belum terlihat secara signifikan.

### **3.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien sebesar -0.008657 dan probabilitas 0.0019. Artinya, setiap peningkatan pembangunan dan akses teknologi informasi dan komunikasi cenderung menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerataan akses teknologi dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pasar, sehingga mampu mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata.

Teori yang dikembangkan oleh Robert M. Solow yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai faktor utama yang mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi. Kemajuan teknologi memungkinkan suatu negara menghasilkan output yang lebih besar dengan jumlah input yang sama, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Tri Nugraha et al., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2023) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021, memiliki hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa variabel teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memiliki keterkaitan dengan tingkat ketimpangan pendapatan, karena kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan peluang ekonomi di suatu wilayah. Namun, apabila akses dan pemanfaatannya tidak merata, perkembangan teknologi juga berpotensi memperlebar kesenjangan antar kelompok masyarakat maupun antar daerah. Oleh karena itu, pembangunan teknologi yang inklusif menjadi faktor penting dalam memengaruhi distribusi pendapatan.

### **3.2.4 Pengaruh Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia**

Secara simultan, variabel Tenaga Kerja, IPM, dan IP-TIK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F-statistic sebesar 97.78723 dengan probabilitas 0.000000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan antarprovinsi selama periode penelitian.



Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan antarprovinsi selama periode penelitian. Dengan demikian, perubahan pada aspek ketenagakerjaan, kualitas pembangunan manusia, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara kolektif mampu memengaruhi tingkat distribusi pendapatan, sehingga kebijakan yang terintegrasi pada ketiga sektor tersebut diperlukan untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan secara lebih efektif.

### 3.2.5 Perspektif Ekonomi Islam Memandang Pengaruh Tenaga Kerja, IPM, dan IP-TIK terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari sudut pandang ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan tidak hanya dipahami sebagai perbedaan tingkat penghasilan antarindividu atau wilayah, tetapi juga sebagai persoalan keadilan distribusi yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Islam menekankan pentingnya terciptanya keseimbangan ekonomi agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja.

Ketimpangan ekonomi dalam perspektif Islam dipahami sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam penguasaan sumber daya ekonomi antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, kondisi ketimpangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip fundamental keadilan ('adl) yang menjadi landasan utama dalam tatanan sosial dan ekonomi (Karimullah, 2025). Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat At taubah 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At Taubah [9]: 60)

Pada ayat di atas menjelaskan bahwasanya di dalam harta seorang muslim ada hak-hak yang harus ditunaikan, diantaranya menyalurkan atau mendistribusikan hartanya kepada saudara semuslim yang membutuhkan baik yang keadaannya meminta atau menjaga dirinya dari meminta bantuan orang lain. Khususnya untuk orang-orang kaya maupun menengah ke atas. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak beredar diantara golongan tertentu saja.

Dalam hal ini, ekonomi Islam telah menjadi tolak ukur terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah lama ada. Praktik sistem ekonomi Islam mulai merambah dalam berbagai bidang ekonomi, diantaranya dalam pemberdayaan zakat fitrah oleh Amil Zakat di berbagai daerah guna pemerataan sumber modal produksi bagi masyarakat kecil, pemberdayaan dan pendirian Baitul Mal sebagai media pelaksanaan penghimpunan keuangan dalam sistem akad, hingga produk pasar modal berupa saham dan obligasi syariah, serta lembaga keuangan dan bank syariah yang tersebar hampir diseluruh wilayah nusantara hingga dunia (Habibi, 2022).

Dalam menjalankan aktivitasnya, Islam menganggap kehidupan manusia sebagai rangkaian organis, dimana semua aktivitas dan wilayah kehidupannya merupakan ibadah. Islam dalam menjalankan kegiatan produktivitas tenaga kerja memiliki dimensi spiritual yang seimbang. Islam tidak mengenal dikotomi antara yang profan dan yang sakral dan juga Islam tidak mengenal kerja yang semata-mata kerja, tetapi Islam menganggap kerja merupakan bagian dari ibadah yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan perintah Allah SWT. Hal ini menjadikan dasar seseorang sebagai iman, sebagai kekuatan dasar yang memberikan etos kerja bagi tenaga kerja. Islam tidak mengabaikan peran imbalan dan manfaat material dalam kinerja seseorang. Islam mengajak kepada: manajer dan majikan untuk bersikap baik kepada bawahannya dengan perlakuan penuh sebagai keluarga dan memberikan kompensasi moneter yang layak dalam pemberian upah atau pun kesejahteraan para tenaga kerja, sehingga keaktifan dan disiplin kerja seseorang bisa terwujud, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat produktivitas kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ada (Fadilah, 2020).

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2018–2023 dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien sebesar 0,001150 dan probabilitas 0,0140 ( $< 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja belum mampu menurunkan ketimpangan, bahkan cenderung meningkat apabila tidak diimbangi dengan pemerataan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien sebesar 0,001774 dan probabilitas 0,7060 ( $> 0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah belum secara langsung mampu mengurangi ketimpangan pendapatan tanpa diiringi pemerataan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien sebesar  $-0,008657$



dan probabilitas 0,0019 ( $< 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa peningkatan akses dan pembangunan teknologi dapat membantu menurunkan ketimpangan melalui perluasan peluang ekonomi dan akses informasi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai F-statistic sebesar 97.78723 dan probabilitas 0,000000 ( $< 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa tenaga kerja, IPM, dan IP-TIK secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di Indonesia, meskipun masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi seperti investasi, kebijakan pemerintah, dan struktur ekonomi daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan pemerataan distribusi kekayaan, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga kerja, memperbaiki akses pendidikan yang inklusif, serta mendorong pembangunan teknologi yang merata agar mampu menekan ketimpangan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel independen dan belum memasukkan faktor lain seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, serta periode pengamatan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lebih beragam dan memperluas cakupan waktu agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal.

## REFERENCES

- Agam Firdaus, M. I. H. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab / Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022 Abstrak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(3), 1–8.
- Al-Mursyid, A. R. (2020). Pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 53–66. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.372>
- Ali, M. R. (2023). Pemahaman Dasar Dalam Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Dan Pendekatan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(6), 738–749.
- Ardiani, D. R., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 52–62. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i2.63277>
- Azhar, M. L., & Nuryadin, M. R. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan TPAK Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(1), 117–127. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.348>
- Devi Astuti, & Alexandra Hukum. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i2.1395>
- Dewi, I., Khotimah, H., Nasution, R., Zulpan, Hariyati, T., & Rusli, A. (2023). Teori populasi dan pengambilan sampel. *Jurnal Literasiologi*, 14(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Dasar Produktifitas Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(September). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/843%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/843/612>
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>
- Karimullah, S. S. (2025). Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 5(1), 55–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.35964/albayan.v5i1.416>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Dj. Siwu, H. F. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61–72.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2), 171–182.
- Novia, T., & Prihadi, Y. (2022). Pertumbuhan Berpendidikan Sma Ke Atas, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5, 1–12.
- Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2, 19–24.
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jgia.v1i1>
- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. *Business Economic Entrepreneurship*, 4(1), 18–28.



- <https://doi.org/https://doi.org/10.61689/bisecer.v4i1.218>
- Prasetya, M. A. W., Lutfitasari, P., Sairo, J., & Saraswati, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS FLORES*, 12(1), 60–74. <https://doi.org/10.37478/als.v12i1.1137>
- Prayoga, A., Simanjuntak, D. G. F., & Seda, F. T. A. (2024). Analisis Perbedaan Pembangunan Teknologi Informasi pada Bidang Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1, 163–169.
- Qadir, A. (2021). Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(1), 47–60. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>
- Riani, A. O., & Suseno, D. A. (2025). Pengaruh Infrastruktur, Teknologi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Per Kapita Dan Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 230–239. <https://doi.org/10.36985/h1dege45>
- S. Berliana, B. A., & Dwi, A. R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi. *Sinomika Journal*, 1(4), 891–902. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>
- Sabillah, R., & Sabillah, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kota Metro Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.24042/slm.v4i1.15955>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 2(3), 43–56.
- Tri Nugraha, H., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pandangan Model Dua-Sektor Lewis dan Model Solow terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ecoplan*, 6(1), 70–77. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.632>
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 245–265. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/628>
- Yusril, S. R. (2024). Pengaruh Kesehatan Bank (Car) Dan Kebijakan Dividen (Dpr) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022. 2, 330–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.274>